

Kebijakan Anti Dumping dan *Trade Deflection*: Studi Kasus *Synthetic Staple Fibre Polyester (PSF)*

Wara Agustina Rukmini*
Departemen Perdagangan RI
Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEUI

Ferry Irawan
Departemen Keuangan RI
Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEUI

Abstract. This research empirically examines whether a country's anti dumping policy can distort export of another country to third markets. This research tries to explore about trade deflection of Indonesia's export on Synthetic Staple Fibre Polyester (PSF) HS 550320 to non-European Union as the result of European Union's (EU) anti dumping policy on Indonesia. This research uses panel data model (fixed effects) and 20 countries (non-European Union) of Indonesia's PSF export during ten years (1996-2005). We find evidence that trade deflection for Indonesia's export on Synthetic Staple Fibre Polyester (PSF) HS 550320 occurred. Because of European Union had imposed anti dumping duty on Indonesia, Indonesia's export to non-European Union had increased ranged from 25 percent to 44 percent. This result shows that anti dumping duty from European Union does not fully carry out negative effect for Indonesia, furthermore this phenomena can be used as "early warning" for Indonesia both for case of Indonesia as exporting country or third countries.

Key words: anti dumping, externality, trade deflection
JEL classifications: C23, C87, F13, F18

PENDAHULUAN

Penggalangan peningkatan ekspor non-migas merupakan salah satu target dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2007 memasukkan peningkatan ekspor non-migas sebagai salah satu agenda dalam rangka menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan dari Departemen Perdagangan, sektor yang memiliki peranan cukup besar dalam ekspor non-migas adalah sektor industri dengan kontribusi sekitar 79,1 persen terhadap sektor non-migas.

Tabel 1. Perkembangan Nilai Ekspor TPT Indonesia Tahun 2003-2007
(dalam juta USD)

	2003	2004	2005	2006	2007
TPT	7.051	7.647	8.590	9.457	9.814
Non-Migas	47.406	55.939	66.428	79.589	91.937
Share TPT terhadap sektor non-migas	14,87	13,67	12,93	11,88	10,67
Sektor Industri	41.981	48.677	55.594	64.895	75.925
Share TPT terhadap sektor Industri	16,80	15,71	15,45	14,57	12,93

Sumber: Departemen Perdagangan

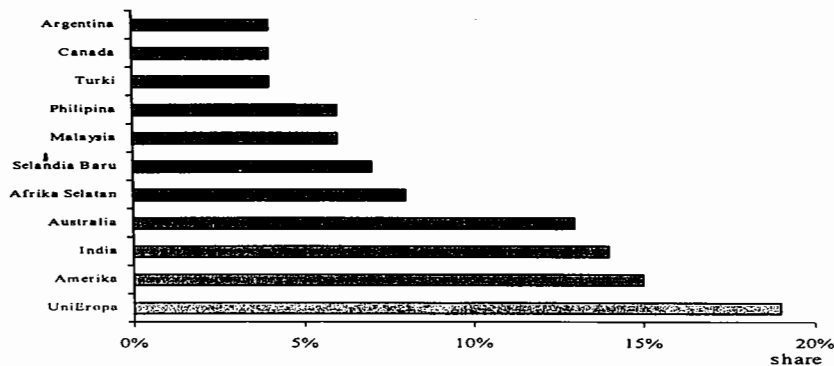
* alamat korespondensi: Jalan M.I Ridwan Rais No 5 Jakarta 10110. Email: wara.agustina@ui.ac.id, agustina_wara@yahoo.com.

Tabel di atas menjelaskan perkembangan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia tahun 2003-2007. Kontribusi TPT terhadap sektor non-migas dalam kegiatan ekspor sebesar 10-14 persen. Sementara itu terhadap sektor industri kontribusi TPT sebesar 12,9-16,8 persen. Selain memiliki *share* yang cukup besar industri, TPT memiliki peran sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian peranan TPT dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia tidak dapat diabaikan.¹ Kontribusi nilai ekspor TPT terhadap sektor industri ataupun non-migas tersebut relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (elektronika, produk hasil hutan, karet dan produk karet, CPO, alas kaki, komponen KBM, udang, kakao kopi).²

Meskipun demikian *share* ekspor TPT terhadap sektor non-migas dan industri selama periode 2003-2007 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan pada sektor non-migas dan industri tidak disertai dengan peningkatan ekspor TPT yang besar, meskipun dari tahun ke tahun ekspor TPT mengalami peningkatan tetapi peningkatannya tidak sebesar peningkatan total sektor non-migas ataupun industri.

Kinerja ekspor TPT tidak terlepas dari adanya hambatan. Kendala tersebut dapat berupa kebijakan luar negeri. Salah satunya berupa kebijakan yang diterapkan oleh pihak luar negeri (negara mitra dagang). Dumping, Subsidi ataupun *Safeguard* merupakan bentuk kebijakan *non-tariff* yang dapat menghambat kinerja ekspor Indonesia. Gambar 1 menunjukkan hambatan *non-tariff* tersebut paling banyak digunakan oleh negara-negara maju seperti US, UE dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri.

Gambar 1. Negara-Negara yang Memiliki Share Terbesar dalam Menggunakan Kebijakan Non-Tarif (1996-2007)



Sumber: Departemen Perdagangan (telah diolah kembali)

¹ Magazine Industri menjelaskan Industri TPT merupakan industri yang tidak bisa diabaikan peranannya. Ada sekitar 98.000 unit usaha kecil dan menengah (UKM) yang menekuni industri ini. Data menunjukkan, UKM-TPT ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 490.000 dengan nilai produksi 14,7 triliun dan ekspor USD900 juta. Industri skala besar yang menggeluti bisnis ini umumnya padat karya dan mengandalkan tenaga kerja yang murah. Total penyerapan tenaga kerja industri TPT diperkirakan mencapai 3,2 juta.

² Departemen perdagangan melaporkan kontribusi terhadap pangsa ekspor: TPT mencapai sekitar USD10 juta, karet dan produk karet USD9 juta, elektronika USD8 juta, sawit USD5 juta, sedangkan furniture, alas kaki, komponen kendaraan bermotor dan udang berkisar USD1,2 juta-USD1,9 juta.

Berdasarkan data dari Departemen Perdagangan, tuduhan anti dumping terhadap TPT Indonesia paling banyak disampaikan oleh Uni Eropa. Untuk tahun 1996-2007 Indonesia mendapatkan 8 buah tuduhan dumping, dan sebanyak 4 produk telah dikenakan BMAD.³ Produk-produk TPT tersebut adalah *Polyester Staple Yarn*, *Polyester Textured Filament Yarn (PTY)*, *Polyester Yarn (man mode staple fibre)*, *Synthetic Staple Fibre Polyester (PSF)*. Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk *Polyester Staple Yarn* antara 4-8 persen, *Polyester Textured Filament Yarn (PTY)* 5-8 persen, *Polyester Yarn (man mode staple fibre)* 11,9 persen, *Synthetic Staple Fibre Polyester (PSF)* 8-15 persen.

Berdasarkan laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Eropa memegang *share* terbesar kedua setelah Amerika untuk ekspor TPT Indonesia hingga tahun 2007 (Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2004). *Market share* ekspor tekstil ke AS mencapai 43 persen, Uni Eropa (UE) 16 persen dan Jepang 5 persen. Peranan Uni Eropa (UE) terus mengalami peningkatan di tahun 2008 hingga menyentuh 23-24 persen. Dengan demikian Uni Eropa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ekspor TPT Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya, sehingga pengenaan BMAD terhadap komoditi TPT Indonesia oleh Uni Eropa dapat berdampak pada pola perdagangan TPT Indonesia.

Bown dan Crowley (2007) menjelaskan pengenaan kebijakan anti dumping oleh suatu negara dapat menimbulkan eksternalitas, dimana negara ketiga yang bukan sasaran kebijakan anti dumping harus menanggung akibat yang ditimbulkan. Eksternalitas tersebut berupa perubahan pola perdagangan, arus perdagangan yang semula ditujukan ke suatu negara beralih ke negara lain yang bukan merupakan tujuan utama kebijakan anti dumping, dengan kata lain negara lain yang bukan merupakan tujuan utama kebijakan anti dumping ikut menanggung dampak dari kebijakan anti dumping yang dikenakan berupa "serangan produk". Negara yang dikenakan dumping akan mengurangi eksportnya ke negara yang mengenakan dumping, dan mengalihkan produknya ke negara lain yang tidak terlibat dalam kebijakan anti dumping.

Bown dan Crowley (2006) menjelaskan pengaruh akibat dari kebijakan anti dumping dapat berupa *trade destruction* ataupun eksternalitas yang berupa *trade deflection*. *Trade destruction* berupa penurunan ekspor ke negara yang mengenakan kebijakan anti dumping, sementara *trade deflection* berupa pembelokan pola perdagangan dimana ekspor negara yang dikenakan dumping ke negara-negara yang bukan merupakan sasaran kebijakan anti dumping mengalami peningkatan. Dampak pengenaan kebijakan anti dumping terhadap negara yang dikenakan dumping dapat berupa *trade deflection* dan *trade destruction*, sementara bagi negara ketiga (pihak yang tidak terlibat dalam kebijakan anti dumping) dapat berupa membanjirnya produk-produk yang semula ditujukan untuk negara penuduh.

Pengenaan kebijakan dumping TPT oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dapat mengakibatkan perubahan pola perdagangan TPT Indonesia terhadap negara-negara lainnya. Kebijakan anti dumping yang dikenakan Uni Eropa terhadap TPT Indonesia, dapat menyebabkan terjadinya eksternalitas berupa pembelokan arus perdagangan (*trade deflection*) ke negara ketiga yang bukan merupakan sasaran utama kebijakan anti dumping.

Penelitian ini akan membatasi pada pengenaan kebijakan BMAD Uni Eropa terhadap TPT Indonesia yaitu PSF, HS 550320 untuk mempermudah penelitian. *Share* ekspor *Synthetic Staple*

³ Direktorat Pengamanan Perdagangan, Departemen Perdagangan menjelaskan perkembangan kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard (1996-2007) didominasi oleh Uni Eropa begitu pula untuk sektor TPT. Penjelasan lebih lanjut mengenai tuduhan dumping oleh Uni Eropa akan disajikan pada bab 3.

Fibre Polyester Indonesia ke Uni Eropa cukup besar apabila dibandingkan ekspor ke negara-negara lainnya. Dengan demikian peranan Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor *Synthetic Staple Fibre Polyester* tidak dapat diabaikan. Dominasi UE terhadap pangsa pasar *Synthetic Staple Fibre Polyester* (PSF) Indonesia tersebut semakin memperkuat munculnya fenomena eksternalitas.

Tabel 2. Kontribusi Ekspor *Synthetic Staple Fibre Polyester* (PSF) Indonesia (periode 1996-2006)

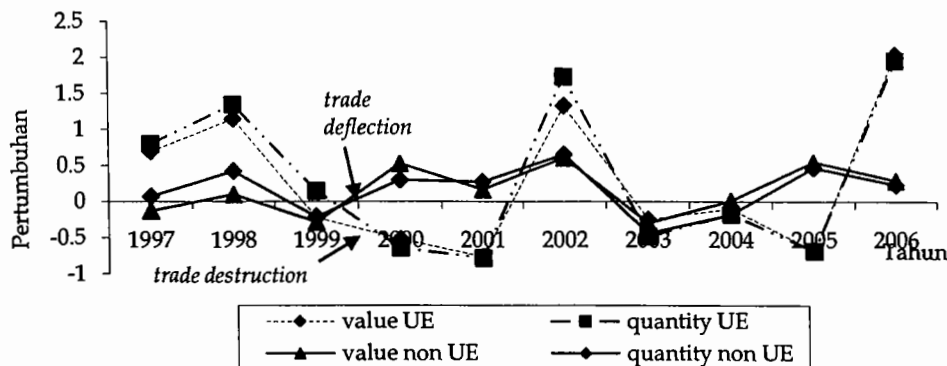
1. EU	10,14	12. Bangladesh	3,42	22. Kolombia	0,68
2. Hong Kong	9,73	13. Egypt	3,37	23. Kenya	0,68
3. USA	9,37	14. Malaysia	3,08	24. venezuela	0,67
4. China	8,58	15. Vietnam	2,74	25. Nepal	0,50
5. India	8,31	16. Sri Lanka	2,17	26. Algeria	0,37
6. Thailand	8,06	17. Morocco	1,82	27. Korea	0,35
7. Turkey	6,77	18. Selandia Baru	1,79	28. Tanzania	0,25
8. Pakistan	6,58	19. Singapura	1,40	29. Brazil	0,23
9. Australia	5,37	20. Syrian	1,31	30. Peru	0,23
10. Jepang	4,05	21. Filipina	1,19	31. Nigeria	0,18

Sumber: United Nations Commercial Trading Database (UN Comtrade)-(telah diolah kembali)

*Catatan: cetak tebal merupakan negara-negara yang akan digunakan dalam penelitian

Peranan Uni Eropa terhadap ekspor PSF Indonesia ditunjukkan dalam tabel 2. *Share* Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor PSF Indonesia menunjukkan adanya ekspor produk PSF dalam jumlah besar untuk Uni Eropa. Dengan demikian apabila Uni Eropa mengenakan kebijakan anti dumping terhadap Indonesia, kemungkinan yang akan terjadi adalah munculnya pembelokan ekspor PSF. Suplai PSF yang cukup besar untuk di ekspor ke Uni Eropa akan dialihkan ke negara lain, atau dengan kata lain negara yang dikenakan dumping dalam hal ini Indonesia akan mencari pasar alternatif lain sebagai tempat untuk memasarkan suplai produk PSF yang tidak bisa masuk ke pasar Uni Eropa tersebut.

Gambar 2. Pertumbuhan Nilai (*Value*) dan Jumlah Ekspor (*Quantity*) PSF Indonesia ke Negara-Negara Uni Eropa (UE) dan Non-Uni Eropa (non-UE) Tahun 1997-2006

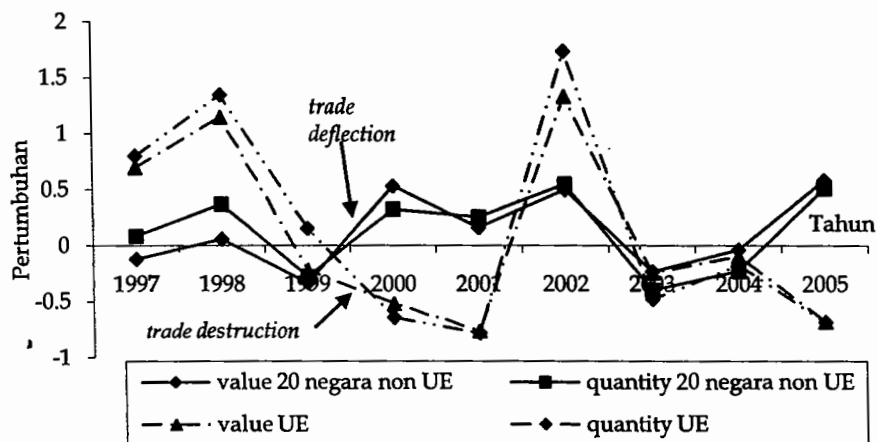


Sumber: UN Comtrade (telah diolah kembali)

Uni Eropa telah mengenakan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap TPT Indonesia yaitu PSF, HS 550320 selama 5 tahun (tahun 2000-2005). Pada saat yang bersamaan di tahun 2000 ekspor Indonesia ke UE mengalami penurunan (*trade destruction*), dan ekspor Indonesia ke negara-negara selain Uni Eropa mengalami peningkatan (*trade deflection*). *Trade deflection* tersebut merupakan pembelokan pola perdagangan PSF Indonesia sebagai akibat adanya kebijakan BMAD Uni Eropa terhadap PSF Indonesia. Gambar 2 menjelaskan keadaan *trade deflection* dan *trade destruction* yang terjadi pada PSF Indonesia. *Trade deflection* yang ditunjukkan pada gambar 2, menunjukkan adanya indikasi kemampuan Indonesia dalam membelokkan arus perdagangan.

Penelitian berusaha menelusuri lebih jauh mengenai pembelokan pola perdagangan PSF, HS: 550320 ke negara-negara selain Uni Eropa sebagai akibat penerapan kebijakan BMAD oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Penelitian meneliti pola perdagangan PSF ke 20 negara tujuan utama selain Uni Eropa selama tahun 1996-2005, dengan pertimbangan 20 negara tersebut termasuk dalam negara-negara tujuan ekspor PSF Indonesia dengan *share* yang cukup besar dan memiliki ketersediaan data untuk penelitian. Indikasi terjadinya *trade deflection* tampaknya terjadi pada 20 negara non-Uni Eropa tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.

Gambar 3. Pertumbuhan Nilai (*Value*) dan Jumlah Ekspor (*Quantity*) PSF Indonesia ke Negara-Negara Uni Eropa (UE) dan 20 Negara Non-Uni Eropa Tahun 1997-2005



Sumber: UN Comtrade (telah diolah kembali)

Negara-negara selain UE yang memiliki *share* cukup besar dan ketersediaan data untuk diteliti yaitu USA, Pakistan, Thailand, Vietnam, Turki, Iran, India, Jepang, Australia, Singapura, China, Malaysia, Kenya, Bangladesh, Selandia Baru, Hongkong, Tanzania, Filipina, Sri Lanka dan Korea. Ekspor produk PSF, HS 550320 dari Indonesia ke 20 negara tersebut mengalami peningkatan dan di saat yang bersamaan ekspor Indonesia ke UE mengalami penurunan ketika Indonesia dikenakan BMAD oleh UE. Dengan demikian terdapat adanya indikasi pembelokan ekspor Indonesia ke 20 negara tersebut.

Studi ini akan meneliti pola perdagangan ekspor produk PSF, HS 550320 dari Indonesia ke 20 negara-negara selain Uni Eropa selama kurun waktu 1996-2005. Dengan demikian data dan metode yang akan digunakan adalah panel data, dengan mengacu pada penelitian Bown dan Crowley (2007).

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dapat menimbulkan eksternalitas yang berupa pembelokan pola perdagangan. Lebih lanjut, Bown dan Crowley (2007) menjelaskan pembelokan perdagangan tersebut (*trade deflection*) mengarah pada negara-negara yang bukan tujuan utama kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (eksternalitas).

Penelitian mengenai *trade deflection* sebagai akibat dampak kebijakan anti dumping belum pernah dilakukan bagi negara berkembang. Bown dan Crowley (2007) telah melakukan penelitian terhadap negara maju, yaitu dampak pengenaan kebijakan anti dumping US terhadap ekspor Jepang ke negara-negara selain US. Dengan demikian belum diketahui kemampuan negara berkembang dalam membelokkan pola perdagangan apabila dikenakan kebijakan anti dumping.

Uni Eropa memiliki peranan yang cukup besar terhadap TPT Indonesia, termasuk ekspor PSF, HS 550320 Indonesia. Dengan demikian kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap ekspor PSF, HS 550320 Indonesia dapat mempengaruhi kinerja Indonesia dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketika Uni Eropa mengenakan kebijakan BMAD terhadap PSF Indonesia HS 550320, tampak adanya penurunan ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebaliknya ekspor Indonesia ke negara-negara selain Uni Eropa meningkat untuk komoditi yang sama.

Dengan demikian dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan sebagai berikut. Apakah kebijakan Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia untuk PSF, HS 550320 menimbulkan eksternalitas yang berupa pembelokan pola perdagangan (*trade deflection*) ekspor Indonesia ke negara-negara selain Uni Eropa?

METODOLOGI DAN DATA

Penelitian merujuk pada studi Bown dan Crowley (2007), fungsi dari ekspor PSF HS 550320 Indonesia dapat ditulis sebagai berikut:

$$\log(vm_{it}) = \alpha_i + \beta_1 \log(Y_t) + \beta_2 \log(Y_{it}) + \beta_3 \log(e_{it}) + \beta_4 \tau_t + \beta_5 \tau_t^{*i} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

dimana:

- vm_{it} : logaritma nilai ekspor riil *Synthetic Staple Fibre Polyester* (PSF) HS. 550320 Indonesia ke negara i pada waktu t
- Y_t : logaritma dari Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia pada waktu t
- Y_{it} : logaritma PDB riil negara tujuan ekspor pada waktu t
- e_{it} : logaritma nilai tukar riil dengan negara tujuan ekspor terhadap Indonesia
- τ_t : Kebijakan Anti Dumping EU terhadap Indonesia
- τ_t^{*i} : kebijakan negara mitra dagang
- α_i : *fixed effect*

Variabel Terikat (Ekspor, $\log(vm_{it})$)

Mankiw (2003b) menjelaskan ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual di luar negeri. Dalam persamaan ekspor, $\log(vm_{it})$, didefinisikan sebagai pertumbuhan nilai ekspor riil PSF HS 550320 ke 20 negara-negara tujuan ekspor Indonesia selain Uni Eropa. Satuan yang digunakan adalah ribuan Rupiah.

Variabel Bebas**GDP Indonesia $\log(Y_t)$**

Mankiw (2003b) mendefinisikan PDB sebagai nilai pasar dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama kurun waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan GDP riil merupakan ukuran yang tepat untuk mengetahui tingkat produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian karena PDB riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bown dan Crowley (2007), penelitian ini memasukan pendapatan domestik (PDB Indonesia) sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi ekspor. PDB Indonesia ($\log(Y_t)$) yang digunakan adalah pertumbuhan PDB riil dengan satuan juta rupiah. Mankiw (2003c) menjelaskan untuk mendapatkan PDB riil dapat digunakan rumus sebagai berikut: $PDB_{riil} = \frac{PDB_{nominal}}{PDB_{deflator}} \times 100$.

Pertumbuhan pendapatan Indonesia, $\log(Y_t)$, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan nilai ekspor PSF HS 550320 Indonesia ke negara-negara mitra dagang Indonesia $\log(vm_{iht})$.

GDP Negara Mitra Dagang, $\log(Y_{it})$

Blanchard (2006) menjelaskan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ekspor adalah pendapatan negara mitra dagang. Penelitian ini menggunakan PDB negara mitra dagang sebagai variabel pendapatan negara mitra dagang. PDB mitra dagang ($\log(Y_{it})$) yang digunakan adalah pertumbuhan PDB riil negara mitra dagang dengan satuan juta Rupiah. Pertumbuhan pendapatan Nasional negara mitra dagang, $\log(Y_{it})$, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor PSF HS 550320 dari Indonesia ke negara-negara mitra dagang Indonesia, $\log(vm_{iht})$.

Nilai Tukar, $\log(e_{it})$

Blanchard (2006) menjelaskan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ekspor adalah nilai tukar. Nilai tukar ($\log(e_{it})$) yang digunakan adalah pertumbuhan nilai tukar riil dalam satuan Rupiah/mata uang negara mitra dagang. Mankiw (2003b) menjelaskan untuk mendapatkan nilai tukar riil dapat digunakan rumus sebagai berikut: $Kurs_{riil} = kurs\ nominal \times rasio\ tingkat\ harga$. Rasio tingkat harga yang digunakan adalah $CPI_{foreign}/CPI_{domestik}$ sehingga nilai tukar riil yang diperoleh adalah dalam satuan asing/Rp. Pertumbuhan nilai tukar negara mitra dagang Indonesia terhadap Indonesia $\log(e_{it})$ berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan nilai ekspor PSF HS 550320 Indonesia ke negara-negara mitra dagang Indonesia $\log(vm_{iht})$.

Kebijakan Anti Dumping (τ_t) dan Kebijakan Negara Mitra Dagang (τ_t^{*i})

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II, Mankiw (2003b) menjelaskan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ekspor adalah kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kebijakan BMAD Uni Eropa terhadap Indonesia maka digunakan variabel kebijakan anti dumping. Bown dan Crowley (2007) menjelaskan penerapan kebijakan anti dumping oleh suatu negara (negara pengimpor) dapat menyebabkan ekspor suatu negara (negara pengekspor) ke negara-negara lainnya yang tidak mengenakan tuduhan anti dumping mengalami peningkatan.

Variabel kebijakan anti dumping (τ_t) yang digunakan adalah *dummy*, karena ingin dilihat besarnya pengaruh kebijakan anti dumping yang berupa pembelokan pola perdagangan Indonesia. Kebijakan anti dumping, menggunakan *dummy* bernilai 1 apabila Uni Eropa telah mengenakan kebijakan bea masuk anti dumping (*duty*) terhadap Indonesia, dan bernilai 0 apabila tidak dikenakan. Kebijakan anti dumping yang berupa penerapan bea masuk anti

dumping oleh UE terhadap impor PSF HS 550320 dari Indonesia (τ_i) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan nilai ekspor PSF HS 550320 Indonesia ke negara-negara mitra dagang selain uni eropa $\log(vm_{it})$.

Merujuk pada penelitian Bown dan Crowley (2007), variabel kebijakan negara mitra dagang (τ_i^{*i}) yang digunakan adalah derajat keterbukaan dengan menggunakan rumus $(ekspor_{riil} + impor_{riil})/GDP_{riil}$, selanjutnya dalam model yang digunakan adalah logaritma derajat keterbukaan.

Kebijakan negara mitra dagang (τ_i^{*i}) berpengaruh positif terhadap nilai ekspor *Synthetic Staple Fibre Polyester* (PSF) HS. 550320 dari Indonesia ke negara-negara mitra dagang Indonesia (vm_{it}).

Tabel 3. Deskripsi Variabel dan Hipotesa

No	Variabel		Deskripsi	Hipotesa
Variabel terikat				
1	Nilai Ekspor	$\log(vm_{it})$	Pertumbuhan ekspor riil	
Variabel bebas				
2	PDB Indonesia	$\log(Y_t)$	Pertumbuhan PDB riil	-
3	PDB negara tujuan ekspor	$\log(Y_{it})$	Pertumbuhan PDB riil	+
4	Nilai tukar	$\log(e_{it})$	Perubahan nilai tukar riil (asing/Rp)	-
5	Kebijakan negara mitra dagang	(τ_i^{*i})	Derajat keterbukaan, Indeks	+
6	Kebijakan <i>anti dumping</i> (<i>duty</i>)	(τ_i)	<i>Dummy</i>	+

Eksternalitas kebijakan anti dumping yang dikenakan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dapat dilihat pada hubungan variabel Kebijakan UE (τ_i) dengan pertumbuhan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara mitra dagang selain Uni Eropa, $\log(vm_{it})$ dimana hubungannya adalah positif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan adalah data tahunan mulai dari tahun 1996-2005 meliputi 20 negara non-Uni Eropa. Penelitian ini mengambil data dari Departemen Perdagangan, IFS, BPS dan Comtrade. Satuan mata uang yang digunakan untuk data yang dipakai adalah Rupiah. Penjelasan lebih lanjut mengenai data dan sumber data dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Data dan Sumber Data

No	Data	Sumber Data	Satuan
1	Nilai Ekspor	Comtrade	Ribu Rupiah
2	PDB Indonesia	IFS	Juta Rupiah
3	PDB negara tujuan ekspor	IFS	Juta Rupiah
4	Nilai tukar	IFS	mata uang asing/Rupiah
5	<i>Degree of Openness</i>	IFS	-
6	Kebijakan BMAD	Departemen Perdagangan	-

Estimasi dilakukan secara bertahap, langkah pertama adalah dengan menguji ada tidaknya *omitted variable*. *Omitted variabel* tersebut berupa *individual effect* yang dapat berhubungan dengan salah satu *regressor* (*fixed effect model*) ataupun tidak berhubungan dengan semua

regressor (random effect model). Untuk mengetahui apakah terdapat efek individu dilakukan uji F, uji Chow atau dengan menggunakan *Likelihood Ratio*. Dari hasil uji F, uji Chow dan *Likelihood Ratio* terdapat efek individu di dalam model. Setelah diketahui terdapat efek individu di dalam model selanjutnya dilakukan uji Hausman.

Dari hasil uji Hausman diperoleh kesimpulan model yang paling baik untuk estimasi adalah dengan menggunakan *fixed effect model*.⁴

Model yang digunakan adalah model semi log koefisien yang dihasilkan merupakan nilai elastisitas, kecuali untuk variabel kebijakan anti dumping (*duty*) yang menggunakan dummy. Sebagian besar variabel-variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekspor. Variabel kebijakan anti dumping (*duty*) yang selanjutnya dalam persamaan estimasi disimbolkan dengan τ_i , $\log(\text{realGDP})$, $\log(\text{realGDPindo})$, $\log(\text{rer})$ signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen, sementara itu variabel $\log(\text{open})$ signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen. Nilai *R-squared* menunjukkan model yang digunakan mampu menjelaskan fenomena sebesar 85,93 persen.

Tabel 5. Variabel-Variabel Bebas dan Terikat

Variabel terikat		$\log(\text{ekspor})$
Variabel bebas		
Kebijakan anti dumping (<i>duty</i>)	(τ_i)	0.371278***
Log (realGDP)	$\log(Y_{it})$	2.516137***
Log (realGDPindo)	$\log(Y_i)$	-2.725675***
Log (open)	$\log(\tau_i^{*i})$	0.596291*
Log (rer)	$\log(e_{it})$	1.670997***
Constant		24.09818*
R ²		0.859324
Adjusted R ²		0.840032

Sumber: Hasil pengolahan

Keterangan: ***=signifikan pada $\alpha=1$ persen, *signifikan pada $\alpha=10$ persen

Hubungan antara pertumbuhan ekspor PSF HS 550320 Indonesia dengan kebijakan BMAD (*duty*) adalah positif dan signifikan. Dengan adanya kebijakan BMAD oleh Uni Eropa terhadap Indonesia, maka ekspor Indonesia ke negara selain non-Uni Eropa (20 negara non-EU) akan meningkat rata-rata sebesar 25,06-44,95 persen dibandingkan sebelum adanya kebijakan BMAD (*ceteris paribus*).⁵

⁴ Selanjutnya untuk mendapatkan hasil estimasi yang efisien dan konsisten, dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastis. Dalam kasus data panel, asumsi homoskedastis lebih penting dibandingkan dengan autokorelasi yang biasanya terjadi pada data *time series*. Menurut Nachrowi dan Usman (2006), kelebihan dari *fixed effect model* adalah model dapat membedakan efek individual serta tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tersebut tidak ditemui masalah multikolinearitas dan ditemui masalah heteroskedastisitas. Estimasi yang dapat digunakan apabila dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan *cross section weights*. *Cross section weights* merupakan GLS dengan menggunakan estimasi *varians residual cross section*, digunakan apabila ada asumsi terdapat *cross section heteroskedasticity*.

⁵ Kennedy (1981) menjelaskan interpretasi *dummy* untuk persamaan dalam bentuk semilog. Usulan Kennedy tersebut sebagai penyempurnaan metode yang disampaikan oleh Halvorsen dan Palmquist. Kennedy merumuskan besaran *dummy* untuk persamaan semilogaritma (dimana *dummy* tidak dalam bentuk log)

Hubungan antara pertumbuhan PDB 20 negara tujuan ekspor Indonesia (non-EU) dengan pertumbuhan ekspor PSF HS 550320 Indonesia adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen GDP negara tujuan ekspor akan menyebabkan ekspor Indonesia meningkat rata-rata sebesar 2,516 persen (*ceteris paribus*).

Hubungan antara pertumbuhan PDB Indonesia dengan pertumbuhan ekspor PSF HS 550320 Indonesia adalah negatif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen PDB Indonesia akan menyebabkan penurunan ekspor Indonesia rata-rata sebesar 2,725 persen (*ceteris paribus*).

Hubungan antara pertumbuhan keterbukaan negara tujuan ekspor dengan pertumbuhan ekspor PSF HS 550320 Indonesia adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen keterbukaan negara tujuan ekspor akan menyebabkan ekspor Indonesia meningkat rata-rata sebesar 0,596 persen (*ceteris paribus*).

Hubungan antara nilai tukar dengan pertumbuhan ekspor PSF HS 550320 Indonesia adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1 persen nilai tukar akan menyebabkan ekspor meningkat rata-rata sebesar 1,670 persen (*ceteris paribus*).

EFEK INDIVIDU

Efek individu yang dihasilkan oleh *fixed effect* merupakan gambaran heterogeneitas setiap negara. Heterogeneitas antarnegara yang dihasilkan mencerminkan adanya faktor-faktor/variabel lain yang dimiliki oleh suatu negara tetapi tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan kata lain negara tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang tercermin dalam variabel lain (diluar variabel bebas dalam model). Apabila diasumsikan variabel bebas tidak berubah maka determinan dari pertumbuhan ekspor PSF HS 550320 Indonesia ke 20 negara-negara selain UE hanya akan tergantung dari efek individu.

Dari hasil estimasi diperoleh *fixed effects (cross)* menunjukkan seberapa besar perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya terhadap rata-rata, sementara nilai intersep menunjukkan nilai yang dimiliki oleh masing-masing individu karena adanya efek individu yang berbeda pada masing-masing negara. Untuk lebih jelasnya hubungan antara *fixed effect (cross)* dan nilai intersep dapat dilihat pada tabel 6.

Besar kecilnya nilai intersep tersebut memberikan gambaran mengenai negara-negara yang berpotensi sebagai tujuan ekspor. Berdasarkan hasil estimasi 5 negara dengan nilai intersep terbesar yaitu Selandia Baru, Turki, Malaysia, Australia, Srilanka, dan 5 negara dengan nilai intersep terkecil yaitu Hongkong, Vietnam, Iran, Jepang dan Korea. Dengan demikian lima negara dengan intersep terbesar tersebut (Selandia Baru, Turki, Malaysia, Australia, dan Srilanka) merupakan negara potensial sebagai tujuan ekspor PSF Indonesia. Sementara negara dengan intersep terkecil (Hongkong, Vietnam, Iran, Jepang dan Korea) merupakan negara yang kurang potensial sebagai tujuan ekspor PSF Indonesia.

sebagai berikut: $g^* = \exp\left(\hat{\epsilon} - \frac{1}{2}V(\hat{\epsilon})\right) - 1$, dimana c merupakan nilai koefisien variabel dummy dan $V(\hat{\epsilon})$ merupakan variance dari $\hat{\epsilon}$. Hasil penghitungan untuk variabel *dummy* dengan menggunakan rumusan Kennedy diperoleh sebagai berikut $g^* = \exp\left(0.371278 - \frac{1}{2}0.24120\right) - 1$ akan diperoleh 0.2506, selanjutnya angka tersebut dikalikan dengan 100 persen sehingga didapat 25.06 persen. Sementara apabila menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Halvorsen dan Palmquist $g^* = \exp(\hat{\epsilon}) - 1$ kemudian dikalikan 100 sehingga diperoleh 44.95 persen. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan kedua teknik tersebut, sehingga yang dipergunakan adalah kisaran yaitu 25.06-44,95 persen.

Tabel 6. Nilai Intersep Setiap Individu

Negara	Fixed effects (cross)	nilai intersep tiap individu
Nilai intersep rata-rata = 24,09818*		
_NEWZEALAND-C	7,172739	31,27092
_TURKEY-C	6,017920	30,1161
_MALAYSIA-C	4,888649	28,98683
_AUSTRALIA-C	4,856995	28,95518
_SRILANKA-C	4,576114	28,67429
_SINGAPORE-C	4,172371	28,27055
_KENYA-C	3,868778	27,96696
_BANGLADESH-C	3,257852	27,35603
_THAILAND-C	1,451359	25,54954
_PAKISTAN-C	1,259002	25,35718
_CHINA-C	0,728615	24,8268
_PHILLIPINES-C	0,295748	24,39393
_TANZANIA-C	0,261370	24,35955
_USA-C	-2,073450	22,02473
_INDIA-C	-2,363111	21,73507
_HONGKONG-C	-4,141427	19,95675
_VIETNAM-C	-6,478360	17,61982
_IRAN-C	-7,362193	16,73599
_JAPAN-C	-9,577340	14,52084
_KOREA-C	-10,81163	13,28655

Sumber: hasil pengolahan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kebijakan Bea Masuk Anti Dumping oleh Uni Eropa terhadap Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekspor *Synthetic Staple Fibre Polyester* (PSF) Indonesia ke negara-negara selain Uni Eropa, pada level signifikansi 99 persen. Dengan adanya kebijakan UE untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Indonesia, menyebabkan ekspor ke 20 negara selain Uni Eropa meningkat rata-rata sebesar 25.06-44.95 persen dibandingkan sebelum adanya kebijakan BMAD (*ceteris paribus*).

Pengenaan BMAD oleh Uni Eropa yang langsung disertai terjadinya pembelokan PSF disebabkan karena sifat barang yang merupakan pengganti terdekat (*strategic substitutes*), hal tersebut sesuai dengan sifat dari pasar monopolistik. Bown dan Crowley (2007) menjelaskan kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya *trade deflection* adalah jenis barang yang diproduksi antara satu negara dengan negara lainnya adalah *strategic substitutes*.⁶ Lebih lanjut Bown dan Crowley (2007) menggunakan kode HS sebagai indentifikasi barang adalah pengganti terdekat (*strategic substitutes*) bagi negara-negara. HS 550320 merupakan produk dengan ciri khas yang

⁶ Krugman dan Obstfeld (2006) menjelaskan terdapat dua syarat agar dumping dapat terjadi pada pasar persaingan tidak sempurna (*monopolistic*) dan pasar tersegmentasi. Salah satu karakter pasar persaingan tidak sempurna (*monopolistic*) adalah sifat barang yang merupakan pengganti terdekat (*strategic substitutes*). Karakter barang tersebut kembali dijelaskan oleh Bown dan Crowley dalam memaparkan eksternalitas dalam dumping sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 hal 16. Lebih lanjut berdasarkan penelitian Bown dan Crowley, karakter produk *strategic substitutes* tercermin dari kode HS 6 digit yang memiliki sifat yang sama antara satu negara dengan negara lainnya.

sama di setiap negara yaitu serat staple sintetik tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.

Dengan demikian produk dengan HS 550320 bagi semua negara adalah sama yaitu serat staple sintetik tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal. PSF dengan HS 550320 satu negara dengan negara lainnya adalah sama sehingga barang dapat dengan mudah saling menggantikan barang di tempat lain. Artinya bila suatu negara mengalami kekurangan produk untuk HS 550320 dapat disuplai dengan produk HS 550320 yang berasal dari negara lain.

Pembelokan ekspor Indonesia ke 20 negara non-Uni Eropa paling besar adalah ke Selandia Baru, sementara pembelokan paling kecil terjadi pada Korea. Besar kecilnya pembelokan tersebut turut dipengaruhi oleh adanya efek individu. Pembelokan tersebut menunjukkan adanya negara lain yang dapat dijadikan sebagai negara alternatif tujuan ekspor PSF Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi tersebut negara-negara yang dapat dijadikan pasar alternatif adalah yang memiliki nilai intersep besar yaitu Selandia Baru, Turki, Malaysia, Australia dan Srilanka (dapat dilihat pada tabel 6).

Data yang diperoleh menunjukkan Selandia Baru sebagai negara tujuan ekspor PSF Indonesia selain mengimpor PSF dari Indonesia Selandia Baru juga melakukan ekspor ke dunia. Angka share ekspor Selandia Baru ke dunia relatif lebih kecil bila dibandingkan Indonesia, hal tersebut mengindikasikan Selandia Baru sebagai produsen PSF dengan jumlah produksi yang tidak sebesar Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi pada Korea, selain melakukan impor dari Indonesia Korea juga mengekspor PSF ke dunia. Kontribusi ekspor Korea ke dunia relatif besar hal tersebut mengindikasikan Korea sebagai produsen PSF memiliki jumlah produksi yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing ekspor negara ke dunia dapat dilihat pada tabel 7.

Kemampuan dalam memproduksi PSF tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembelokan PSF Indonesia, dimana pembelokan relatif kecil ke negara yang memiliki kemampuan produktifitas tinggi. Pembelokan relatif besar ke negara yang memiliki kemampuan produktifitas rendah. Fenomena tersebut sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Bown dan Crowley (2007) dimana masing-masing negara memproduksi produk yang sama, dalam kasus ini adalah PSF, masing-masing negara akan bersaing dalam jumlah, dan barang yang dikonsumsi domestik ataupun yang diimpor adalah saling menggantikan (*strategic substitutes*).

Dengan demikian apabila suatu negara memiliki produktifitas lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan output yang lebih banyak untuk produk yang sama dibandingkan negara yang dikenakan kebijakan BMAD, maka pembelokan oleh negara yang dikenakan kebijakan BMAD ke negara yang memiliki produktifitas tinggi akan rendah. Proporsi ekspor yang tinggi menunjukkan adanya output dalam jumlah besar yang diekspor.

Hal lain yang dapat mempengaruhi pembelokan adalah adanya insentif yang berupa pemotongan harga (*discount*). Ketika produk PSF Indonesia yang ditujukan untuk Uni Eropa mengalami hambatan dalam menembus pasar Uni Eropa, maka Indonesia berusaha mencari pasar lain sebagai alternatif tujuan ekspor PSF Indonesia. Pada dasarnya pembelokan tidak terjadi secara otomatis, salah satu faktor yang dapat mempermudah terjadinya pembelokan tersebut adalah pemotongan harga. Konsumen akan bereaksi terhadap harga dan insentif,

sebagaimana telah dijelaskan dalam teori permintaan apabila harga turun maka permintaan akan meningkat.⁷

Tabel 7. Kontribusi Ekspor Negara Tujuan ke Dunia

Negara	Kontribusi
Republik Korea	0,3380449
Amerika Serikat	0,0897368
Hongkong SAR	0,0848945
Thailand	0,0690032
Jepang	0,0407035
Cina	0,0314588
Indonesia	0,023683
Malaysia	0,0236657
India	0,0136334
Turki	0,0122852
Australia	0,0021005
Pakistan	0,0020856
Iran	0,0009367
Vietnam	0,0006766
Singapur	0,0006279
Philipina	0,0001048
Selandia Baru	0,0000036
SriLanka	0,0000003
Kenya	0,0000003
Bangladesh	0,0000000
Tanzania	0,0000000

Sumber: UN Comtrade

Perilaku konsumen terkait dengan insentif, apabila mendapatkan insentif. Insentif yang berupa *discount* atau pemotongan harga maka perilaku konsumen yang akan muncul adalah permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Di sisi lain produsen yang berupaya untuk memaksimalkan profit dan menggunakan PSF sebagai bahan input dalam produksi, cenderung untuk memilih harga input produksi yang lebih murah termasuk produsen di negara tujuan ekspor PSF Indonesia yang sekaligus menjadi konsumen PSF Indonesia. Penelitian ini tidak memasukkan variabel harga dalam estimasi, sehingga hubungan antara harga dan pembelolan tidak dapat dipastikan apakah positif atau negatif.⁸

Hubungan pertumbuhan PDB negara tujuan ekspor terhadap pertumbuhan ekspor PSF Indonesia adalah positif, pada level signifikansi 99 persen. Setiap kenaikan 1 persen PDB negara tujuan ekspor akan meningkatkan ekspor PSF Indonesia sebesar 2,516 persen *ceteris paribus*, atau

⁷ Mankiw (2003)₁ menjelaskan insentif memiliki peranan yang penting karena dapat mengubah perilaku masyarakat. Kenaikan harga ataupun penurunan harga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Pembuat kebijakan publik seharusnya tidak pernah melupakan pentingnya insentif karena kebijakan publik mempengaruhi perhitungan biaya atau manfaat yang dihadapi masyarakat dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Insentif berupa pemotongan harga terhadap produk PSF Indonesia untuk negara selain Uni Eropa dapat menjadi salah satu faktor yang mempermudah pembelolan, sehingga apabila harga diturunkan (karena terjadi kelebihan suplai akibat produk PSF tidak dapat menembus pasar Uni Eropa, sehingga harga cenderung turun) maka permintaan akan meningkat.

⁸ Penelitian mengacu pada penelitian Bown dan Crowley (2007) yang menggunakan nilai tukar sebagai pendekatan harga.

dengan kata lain proporsi perubahan jumlah ekspor PSF 2,516 kali lebih besar daripada proporsi perubahan PDB negara tujuan ekspor.⁹

Bown dan Crowley (2007) menjelaskan PDB sebagai pendekatan pengeluaran, apabila PDB negara tujuan ekspor meningkat maka permintaan terhadap produk domestik juga akan meningkat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Blanchard, dimana PDB negara mitra dagang sebagai determinan ekspor suatu negara berhubungan positif.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Houthakker dan Magee (1969) menunjukkan elastisitas pendapatan suatu negara akan sangat tinggi terutama untuk sektor manufaktur (produk akhir). Berdasarkan penelitian tersebut ditunjukkan bahwa US merupakan *net importer* untuk produk manufaktur karena elastisitas pendapatan lebih besar pada sisi impor dibandingkan dengan elastisitas pendapatan negara mitra dagang terhadap ekspor produk manufaktur dari US.¹⁰

Penelitian Houthakker disempurnakan oleh Marquez (1990) dengan membuktikan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan akan barang-barang impor pada negara berkembang dan Jepang rendah atau di bawah satu, sementara pada negara industri elastisitas pendapatan cenderung lebih besar atau di atas 1.

Elastisitas pendapatan terhadap permintaan ekspor PSF HS 550320 adalah lebih besar dari 1 atau dengan kata lain hubungan pendapatan negara mitra dagang terhadap permintaan ekspor adalah elastis.¹¹ Dengan demikian *synthetic staple fibre polyester* berdasarkan elastisitas pendapatan terhadap permintaan merupakan barang normal bagi negara tujuan ekspor selain.

Negara tujuan utama ekspor PSF HS 550320 yang digunakan dalam penelitian sebagian besar cenderung merupakan negara berkembang (LDC) dengan demikian elastisitas pendapatan terhadap permintaan bagi negara berkembang yang telah dilakukan oleh Marquez tidak terbukti pada kasus ekspor PSF HS 550320. Kondisi tersebut sejalan dengan penjelasan Bown dan Crowley (2007), bentuk pasar untuk HS 550320 lebih cenderung pada pasar monopolistik. Dengan menggunakan konsep HS 550320, maka barang di pasar dapat dikatakan bersifat *strategic substitutes* atau pengganti terdekat. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan tersebut menunjukkan produk memiliki alternatif pengganti terdekat karena bentuk pasar persaingan mengarah pada persaingan sempurna yaitu pasar monopolistik, dimana barang adalah *strategic substitutes* dan banyak penjual.

Hubungan positif antara PDB dengan permintaan ekspor, sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suly (2007) yang dapat membuktikan bahwa PDB negara mitra dagang berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor TPT Indonesia baik dalam jangka

⁹ Mankiw (2003), menjelaskan konsep elastisitas sebagai perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Misalnya elastisitas harga dari permintaan ataupun penawaran = $\frac{20\%}{10\%} = 2$, hal ini berarti perubahan kuantitas yang diminta ataupun ditawarkan dua kali lebih besar dari perubahan harganya.

¹⁰ Penelitian ini meneliti menggunakan PSF yang merupakan *intermediate goods*, sehingga akan lebih tepat apabila menggunakan GDP sektor tetapi karena keterbatasan data untuk mendapatkan GDP sektor di negara tujuan ekspor, untuk mempermudah penelitian maka digunakan GDP total.

¹¹ Mankiw (2003), Elastisitas pendapatan dari permintaan digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta apabila pendapatan konsumen berubah. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Pada barang normal kenaikan pendapatan akan meningkatkan kuantitas yang diminta dan apabila pendapatan lebih tinggi tetapi permintaan turun maka jenis barang adalah barang inferior.

panjang maupun jangka pendek. Perbedaannya pada penelitian Suly (2007), negara tujuan ekspor hanya Amerika dan komoditi TPT adalah agregat. Penelitian ini melengkapi penelitian Suly, PDB negara mitra dagang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor TPT Indonesia untuk komoditi yang lebih spesifik yaitu PSF HS 550320.

Hubungan pertumbuhan PDB Indonesia dengan pertumbuhan ekspor PSF Indonesia adalah negatif, pada level signifikansi 99 persen. Setiap kenaikan 1 persen PDB Indonesia akan menurunkan ekspor PSF Indonesia rata-rata sebesar 2,725 persen *ceteris paribus* atau dengan kata lain proporsi perubahan jumlah ekspor PSF 2,725 kali lebih kecil daripada proporsi perubahan PDB Indonesia.¹²

Bown dan Crowley (2007) menjelaskan PDB sebagai pendekatan pengeluaran, apabila PDB domestik meningkat maka permintaan terhadap produk domestik juga akan meningkat. Dengan demikian apabila PDB domestik meningkat maka ekspor ke negara lain justru akan menurun. Komoditi yang semula ditujukan untuk ekspor akan dialihkan sebagian untuk konsumsi domestik karena meningkatnya permintaan domestik sebagai akibat peningkatan PDB domestik.

Hasil estimasi menunjukkan koefisien PSF Indonesia sebesar 2,725 berhubungan negatif terhadap PDB domestik atau sesuai dengan penelitian Bown dan Crowley besaran koefisien tersebut menunjukkan penyerapan produk ekspor untuk dikonsumsi domestik. Besaran koefisien tersebut menunjukkan hubungan pendapatan domestik terhadap permintaan PSF adalah elastis, dengan demikian PSF merupakan barang normal bagi domestik.

Kondisi di atas menjelaskan bahwa produk PSF merupakan barang yang masih dibutuhkan untuk domestik. Dilihat dari karakteristiknya pada dasarnya PSF menjadi bahan baku bagi industri tekstil. Hal tersebut sejalan dengan informasi dari Asosiasi Produsen *Synthetic Fiber Indonesia* (Apsyfi) yang menjelaskan hampir keseluruhannya diserap oleh industri tekstil, seperti pabrik kain yang ditenun dan dirajut. Dengan demikian PSF pada dasarnya merupakan bahan baku yang cukup penting bagi industri tekstil di domestik.

Hubungan derajat keterbukaan negara tujuan ekspor terhadap pertumbuhan ekspor PSF Indonesia adalah positif, pada level signifikansi 90 persen. Setiap kenaikan 1 persen derajat keterbukaan akan menaikkan ekspor PSF Indonesia sebesar 0,596 persen *ceteris paribus* atau dengan kata lain proporsi perubahan jumlah ekspor PSF 0,596 kali lebih besar daripada proporsi perubahan derajat keterbukaan.

Bown dan Crowley (2007) menjelaskan derajat keterbukaan dapat digunakan sebagai pendekatan kebijakan di negara tujuan ekspor. Derajat keterbukaan menggambarkan liberalisasi suatu negara. Dengan semakin besarnya derajat keterbukaan suatu negara maka aktifitas suatu negara dalam melakukan kegiatan perdagangan juga semakin besar, dengan kata lain negara tersebut menjadi semakin terbuka terhadap negara lain, negara tersebut semakin liberal.

Derajat keterbukaan yang digunakan adalah jumlah ekspor dan impor terhadap PDB, derajat keterbukaan dapat menggambarkan liberalisme suatu negara ataupun proteksi. Dimana

¹² Pada penelitian ini digunakan PDB total dengan mengacu pada penelitian Bown dan Crowley (2007), tidak membedakan antara PDB sektor dan PDB agregat. Selain itu, trend PDB total dan PDB sektor memiliki pola yang sama. Sehingga untuk konsistensi data (antara PDB partner dan PDB Indonesia) sekaligus mengacu pada penelitian Bown dan Crowley digunakan PDB total.

hubungan antara keduanya adalah berkebalikan. Semakin besar derajat keterbukaan suatu negara maka negara tersebut semakin terbuka (liberal) dan semakin sedikit dalam menerapkan proteksi. Keterbukaan tersebut dapat menjadi indikasi adanya kebijakan yang dianut oleh suatu negara terkait dengan adanya proteksi ataupun hambatan perdagangan. Hal tersebut sejalan dengan konsep keterbukaan yang dikemukakan oleh Ben-David dan Kimhi dalam Belke (2005), semakin besar derajat keterbukaan suatu negara maka terdapat kecenderungan kebijakan yang berupa proteksi adalah kecil.

Hubungan antara pertumbuhan nilai tukar (asing/rp) terhadap pertumbuhan ekspor PSF Indonesia adalah positif, pada level signifikansi 99 persen. Setiap kenaikan 1 persen nilai tukar akan menaikkan ekspor PSF Indonesia sebesar 1,671 persen *ceteris paribus* atau dengan kata lain proporsi perubahan jumlah ekspor PSF 1,671 kali lebih besar daripada proporsi perubahan nilai tukar.

Nilai tukar digunakan sebagai pendekatan harga. Berdasarkan hasil estimasi apabila mata uang negara tujuan ekspor melemah atau rupiah mengalami apresiasi maka ekspor justru meningkat. Dengan kata lain ketika barang menjadi lebih mahal bagi negara tujuan ekspor, permintaan ekspor justru meningkat. Fenomena tersebut menunjukkan keadaan yang tidak sesuai dengan hipotesa dan teori. Hal yang dapat menjelaskan keadaan tersebut adalah *raw imported material good*, dimana dalam proses pembuatan PSF sebagian besar bahan baku yang digunakan masih berasal dari impor atau dengan kata lain domestik belum dapat memenuhi kebutuhan akan bahan baku pembuatan serat sintetik *polyester*. Berikut komposisi bahan baku impor pembuatan serat sintesis dari tahun ke tahun:

Tabel 8. Persentase Bahan Baku Impor Pembuatan Serat Sintesis (1996-2005)

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
42,40	48,25	60,63	89,37	85,19	61,95	81,75	48,00	50,60	42,61
persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen	persen

Sumber: BPS

Selain masalah ketergantungan bahan baku impor hal lain yang dapat mempengaruhi kondisi nilai tukar tidak berjalan sesuai dengan teori adalah keadaan di lapangan terkait dengan pembelian bahan baku. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari asosiasi Produsen *Synthetic Fibre* Indonesia (Apsyfi) untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku, industri PSF di Indonesia mendapatkan bahan baku dari domestik maupun luar negeri. Pemenuhan akan bahan baku dari luar negeri dilakukan dengan menggunakan mata uang dollar, hal yang sama terjadi apabila industri PSF Indonesia membeli bahan baku dari industri domestik.

Industri penyedia bahan baku PSF di domestik ternyata menggunakan mata uang dollar dalam menjual produksi, walaupun pembeli juga berasal dari Indonesia. Sehingga apabila rupiah mengalami depresiasi bagi industri PSF menjadi hambatan dalam melakukan produksi, karena harga bahan baku yang diperoleh baik dari luar negeri maupun dalam negeri menjadi lebih mahal karena semua transaksi menggunakan dollar. Akibatnya output produksi berkurang termasuk dalam melakukan kegiatan ekspor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat dibuktikan terjadinya pembelokan terhadap 20 negara non-Uni Eropa akibat adanya kebijakan BMAD Uni Eropa terhadap Indonesia berupa peningkatan ekspor ke negara-negara selain Uni Eropa. UE yang mengenakan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Indonesia, menyebabkan ekspor ke 20 negara selain Uni Eropa meningkat rata-rata sebesar 25,06-44,95 persen dibandingkan sebelum adanya kebijakan BMAD (*ceteris paribus*). Dengan demikian tidak sepenuhnya penerapan kebijakan anti dumping oleh suatu negara membawa pengaruh yang negatif. Hal yang perlu diwaspadai terkait dengan fenomena pembelokan adalah munculnya tuduhan dumping terhadap Indonesia dari negara-negara selain Uni Eropa, apabila produk-produk yang semula ditujukan untuk Uni Eropa membanjiri negara lain selain Uni Eropa. Dengan demikian fenomena pembelokan ekspor tersebut menjadi "early warning" bagi pemerintah maupun para pelaku usaha, agar pembelokan ekspor jangan sampai menjadi bumerang.

Terkait dengan bahan input dalam produksi ditemukan bahwa ketergantungan terhadap impor bahan baku pembuatan PSF masih tinggi. Kondisi tersebut dipicu oleh adanya perbedaan harga apabila bahan baku diproduksi di domestik dan diperoleh dari luar negeri (impor). Sementara itu para pelaku usaha cenderung untuk memaksimalkan keuntungan sehingga akan lebih memilih bahan baku dengan harga yang lebih murah yaitu bahan baku impor. Pengembangan industri yang berbasis pada bahan baku industri perlu diupayakan dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik. Kebijakan yang mendukung upaya tersebut perlu dilakukan, misalnya keringanan pajak untuk industri berbasis bahan baku.

Di samping permasalahan tersebut di atas ditemui peluang yang ada untuk ekspor PSF Indonesia, sesuai dengan hasil penelitian yaitu hasil estimasi efek individu. Sebagai negara yang dikenakan kebijakan anti dumping, Indonesia hendaknya dapat mencari alternatif pasar lain untuk pemasaran produk. Pemerintah perlu melakukan upaya promosi, negosiasi terhadap negara-negara yang merupakan negara yang berpotensi sebagai negara tujuan ekspor (sebagaimana telah diperoleh dari efek individu, negara-negara yang berpotensi sebagai ekspor PSF Indonesia antara lain: Selandia Baru, Turki, Malaysia, Australia, dan Srilanka).

Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini tidak dapat melihat pola yang terjadi apabila negara tujuan ekspor juga mengenakan kebijakan BMAD terhadap Indonesia, diharapkan ada penelitian lebih lanjut. Penurunan ekspor ke negara Uni Eropa sebagai negara yang mengenakan kebijakan anti dumping (*trade destruction*) tidak dapat dilihat dengan jelas pada penelitian ini karena keterbatasan data, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat mengulas lebih dalam sehingga dapat dilihat *trade deflection* dan *trade depression* lebih detail.

Pembelokan pola perdagangan tidak hanya disebabkan oleh kebijakan anti dumping, krisis yang terjadi pada negara tujuan ekspor dapat menyebabkan pembelokan pola perdagangan ke negara lain yang tidak mengalami krisis. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengalisa dari sudut pandang yang berbeda. Variabel harga belum dimasukkan sebagai variabel independen pada penelitian ini, diharapkan pada penelitian selanjutnya mempertimbangkan harga sebagai variabel independen. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti GMM (*dynamic panel*) yang mempertimbangkan adanya *lag* dari variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pertekstilan Indonesia. (2004). *Industri dan Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia*.
- Belke, A. (2005). *Degree of Openness and the Choice of Exchange Rate Regimes-a Re-Evaluation with Value Added Based Openness Measures*. Hohenheim University.
- Blanchard, O. (2006). *Macroeconomics* (4th Edition ed.). New Jersey: Pearson, Prentice Hall.
- Bown, C. P. (2007). *Global Anti Dumping Database Version 3.0*. Department of Economics and International Business School, Brandies University.
- Bown, C. P., & Crowley, M. A. (2006). Policy Externalities: How US Anti Dumping Effects Japanese Exporters to the EU. *European Journal* , 696-714.
- Bown, C. P., & Crowley, M. A. (2007). Trade Deflection and Trade Depression . *European Journal* , 176-201.
- Departemen Perdagangan. (2007). *Tumbuh Berkelanjutan Target Pertumbuhan Ekspor Non-Migas Tahun 2007*. Departemen Perdagangan.
- Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional. (2007). *Perkembangan Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard 1996-2007*. Jakarta: Departemen Perdagangan.
- Houthakker, H. S., & Magee, S. P. (1969). Income and Price Elasticities in World Trade. *The Review of Economics and Statistics* , 51 (2).
- Kennedy, P. E. (1981). Estimation with Correctly Interpreted Dummy Variables in Semilogarithmic Equations. *The American Economic Review* , 71 (4), 801.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2006). *International Economics, Theory and Policy* (7th Edition ed.). USA: Pearson.
- Magazine Industri. (n.d.). *Industri TPT di Persimpangan Jalan*. Retrieved Juni 25, 2008, from http://www.magazine_industri.com
- Mankiw, G. N. (2003a). *Pengantar Ekonomi Jilid 1* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, G. N. (2003b). *Pengantar Ekonomi Jilid 2* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, G. N. (2003c). *Teori Makroekonomi* (5th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Marquez, J. (1990). Bilateral Trade Elasticities. *The Review of Economics and Statistics* , 72 (1), 70-77.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suly, R. S. (2007). *Analisis Pengaruh Harga Relatif Produk Domestik Bruto dan Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia ke Amerika Serikat*. Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana FEUI.